

Reportase dalam Hegemoni Pemerintah dan Media: Studi Kasus Jurnalis Kepresidenan Era Soeharto dan Joko Widodo

Roswita Oktavianti

Abstrak/Abstract

Pers Indonesia mengalami dua rezim pemerintahan. Era Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan era Reformasi pasca Soeharto. Keduanya memiliki dinamika pers yang berbeda. Pada Orde Baru, terutama pasca peristiwa Malari, pemerintah Indonesia menjadi pemegang hegemoni dominan. Pemerintah dalam konteks penelitian ini, Presiden, memiliki pengaruh kuat terhadap perusahaan pers dan jurnalis sebagai aktor di dalamnya. Sebaliknya, pada Era Reformasi dengan kebebasan pers, dominasi beralih dalam media itu sendiri. Dalam arti, jurnalis sebagai subordinat pada hegemoni pemilik media sekaligus pemerintah. Proses reportase jurnalis mengalami perubahan, tidak hanya sebagai dampak dari kebebasan pers tetapi juga pers sebagai sebuah industri. Sejumlah penelitian dan publikasi menyoroti perubahan Era Orde Baru ke Era Reformasi yang terjadi pada tataran regulasi pers Indonesia dan implikasinya pada pemberitaan. Sementara itu, penelitian ini berupaya mengungkap lebih jauh bagaimana perubahan reportase jurnalis dari sudut pandang jurnalis di lingkungan terdekat Presiden atau jurnalis kepresidenan pada dua era pemerintahan, Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo.

The Indonesian press has survived two regimes of government: the New Order era during the reign of President Soeharto and the post-Soeharto Reform era. The press dynamics in the two periods are different. In the New Order, especially after the Malari incident, the government held the dominant hegemony. The President wielded a powerful influence on the media companies and journalists as the actors. By contrast, in the Reform Era which is typified by freedom of the press, the dominance shifts to the media themselves. In this situation, journalists are the subordinates of media owners and even the government. The news reporting process is changing, as a result of not only the freedom but also industrialization of the press. A number of studies and publications highlight the changes of the New Order Era to the Reform Era that took place in the press regulations and their implications on the news. This research seeks to reveal further how press coverage in changes from the perspective of journalists close to the president or journalists posted in the presidential palace in the era of Soeharto and Joko Widodo.

Kata kunci/Keywords:

Reportase, hegemoni, kebebasan pers, Soeharto, Joko Widodo

Reportage, hegemony, freedom of press, Soeharto, Joko Widodo

Universitas Tarumanegara, Letjen S. Parman,
Grogol Petamburan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470

roswitaoktavianti@gmail.com

Pendahuluan

Dinamika pers bergerak mengikuti rezim yang berkuasa. Kondisi ini misalnya, tercermin pada pers di Amerika Serikat dan Israel pada 2017. Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memiliki hubungan tidak harmonis dengan media-media arus utama di negaranya. Kedua pemimpin negara itu, kerap menyerang media dan menempatkan jurnalis sebagai musuh. Trump lebih sering berkicau di akun media sosial Twitter @realDonaldTrump ketimbang bicara langsung kepada media. Gedung Putih bahkan membatasi kehadiran media dalam konferensi pers tertentu, memblokir tayangan konferensi pers yang biasanya disiarkan secara langsung di televisi. Hal serupa dilakukan Netanyahu yang lebih memilih melayani foto bersama, menyiapkan

video atau pernyataan lewat media sosial Facebook dan WhatsApp. Netanyahu bahkan menutup kantor perwakilan stasiun televisi Al-Jazeera di Israel dengan tuduhan berita-berita didalamnya kerap menyulut kemarahan (*Kompas*, 2017).

Penggunaan media sosial dan pesan instan untuk menyampaikan pesan mengakibatkan perubahan reportase jurnalis. Dalam hal ini, media tradisional menggunakan media baru sebagai sumber berita (Chen, 2013). Kesempatan berinteraksi melalui internet dan media sosial ini mengarah pada cakupan aktor dan sumber informasi yang lebih luas (Archetti, 2013). Media baru memungkinkan wartawan memperluas jaringan pribadi dan sarana komunikasi, dan sebaliknya mulai mengurangi ketergantungan dengan sumber-sumber resmi (Bivens, 2008).

Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai informasi utama bagi jurnalis terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden RI ke-6 tersebut aktif menggunakan media sosial, Facebook, Twitter, dan Youtube untuk berkomunikasi dengan khalayak. Tujuan awal SBY bergabung di media sosial agar terhubung langsung dengan masyarakat di era digital tanpa diperantarai pers. Apalagi pers sudah dikuasai pemilik yang memiliki kepentingan politik pada pemilihan presiden tahun 2014. Dengan adanya media sosial, masyarakat dan media massa bisa memperoleh informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama. Media sosial ini, terbilang sukses dan efektif menjadi penghubung antara SBY dengan masyarakat, dan SBY dengan media massa. Youtube ibarat 'televisi SBY' yang menjadi rujukan media massa. Pernyataan di Twitter dan Facebook dengan tanda "*SBY*", yang artinya ditulis langsung oleh SBY, juga menjadi rujukan media massa. Menurut Asisten Staf Khusus Presiden SBY Bidang Komunikasi, Imelda Sari, dengan ruang lingkup terbatas, informasi melalui media massa dinilai kurang efektif. Sebaliknya, media sosial di Indonesia memiliki 60 juta pengguna. Pernyataan yang disampaikan Presiden SBY di media televisi dan koran seringkali sepotong-sepotong. Sementara di Youtube ditayangkan utuh, tanpa jeda (Sinaga, 2014).

Kondisi ini jelas berbeda dengan era Orde Baru tahun 1967-1998. Awalnya, Soeharto menjadikan pers Indonesia 'bebas dan bertanggungjawab' serta diabdikan kepada 'pembangunan nasional'. Kenyataannya, pers harus mau dan mampu mengekang diri untuk tidak memberitakan segala sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pemerintahan Soeharto (Adisubrata, 2013). Puncaknya pada pemberedelan pers pada Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari ("Malari") 1974. Presiden Soeharto membantah pemberitaan surat kabar dan desas-desus masyarakat bahwa keluarga Presiden ikut serta dalam sejumlah perusahaan swasta. Bantahan disampaikan di hadapan pengurus dan anggota

Dewan Pembina Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (Surjomihardjo *et al*, 2002).¹ Saat itu terdapat dua belas penerbitan kehilangan surat izin terbit dan surat izin cetak, atau dibredel. Hanya dua media yang kemudian diizinkan terbit kembali dengan catatan melakukan perombakan dan perampingan staf (Hill, 2011a).

Menurut mantan Direktur Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Taufik Abdullah, pada era Orde Baru, pemerintah bukan saja pemegang kekuasaan yang dominan, tetapi juga pemegang hegemoni dari kesadaran dan ingatan kolektif bangsa. Orde Baru berusaha sekuat tenaga untuk "mendiamkan" atau "mendiskreditkan" segala suara yang dianggap merusak dunia serba-konsensus yang telah dikuasainya (Surjomihardjo *et al*, 2002:xxii).

Herlambang R. Perdana Wiratraman dalam artikel berjudul "Breaking The Silence, Does Post-Soeharto Indonesian Law System Guarantee Freedom of the Press?" menyimpulkan bahwa semasa pemerintahan Soeharto telah terjadi penyalahgunaan kebebasan pers. *Pertama*, berupa pelarangan (terbit terhadap) media dan sering kali dilakukan pengkriminalan wartawan dan penyunting (redaktur). *Kedua*, diterapkannya Undang Undang Darurat perang secara sewenang-wenang walau dalam situasi darurat bahkan tanpa mempertimbangkan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia atau Undang Undang Pers. *Ketiga*, Undang Undang dipolakan untuk menciptakan pemerintahan yang hegemonis melalui berbagai jenis tindakan yang bersifat propaganda, seperti semboyan "pers pembangunan" dan "pers Pancasila" serta "pers yang bebas bertanggungjawab". Praktik-praktik ini semata demi melayani kepentingan rezim politik penguasa, ketimbang melindungi hak dan kebebasan pers atau wartawan (Adisubrata, 2013).

Lahirnya Undang Undang Pers Nomor 40 pada September 1999 dianggap banyak pihak sebagai salah satu undang-undang terbaik di bidang pers di kawasan Asia, bahkan di dunia. Undang-undang tersebut menunjukkan pengakuan terhadap kebebasan pers (Hill, 2003). Dalam hal ini kerja jurnalis mengalami transformasi. Hal ini diperkuat dalam penelitian analisis isi berita utama terhadap Tabloid DeTIK pada Pemerintahan Orde Baru dengan Tabloid DeTak pada Pemerintahan Orde Reformasi yang menunjukkan kehidupan pers sangat ditentukan oleh kebi-

1 Surjomihardjo dkk merupakan anggota Tim Peneliti Sejarah Pers di Indonesia 1976-1977 dan 1977-1978. Penelitian pertamakali diterbitkan oleh Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI bekerjasama dengan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Leknas-LIPI) tahun 1980. Laporan diterbitkan kembali pada Januari 2002 oleh Penerbit Buku Kompas.

jakan pemerintah. Pada Orde Baru, pemerintah lebih banyak mengontrol kehidupan pers, terjadi hubungan koordinatif yang tidakimbang, karena segala sesuatu ditentukan oleh pemerintah. Sementara, pada Era Reformasi terjadi euforia keterbukaan sehingga pers menjadi 'galak' dalam memberitakan sesuatu (Sukendro, 2000).

Kondisi ini kemudian berdampak pada reportase jurnalis tidak hanya dalam hal konten berita tetapi juga teknis peliputan di lapangan. Jurnalis kepresidenan era Soeharto, misalnya, merasakan ketatnya peliputan di lingkungan istana² sehingga jurnalis membentuk jaringan tatap muka dengan tujuan solidaritas antara jurnalis yang mendapat akses dan belum mendapat akses peliputan. Sementara, jurnalis dalam era kebebasan pers atau pada masa Presiden Joko Widodo, membentuk jaringan termediasi teknologi berisi bahan berita, tanpa mensyaratkan kehadiran di lokasi peliputan.

Berawal dari "pers perjuangan", tren memperlihatkan terjadinya pergeseran ke arah penayagunaan teknologi menuju "modernisasi" dan "profesionalisme" (Hill, 2011a). Sebagaimana tertulis dalam Buku Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen 2017 yang menyebutkan, di era kemerdekaan pers, teknologi informasi menjadi kunci. Bila dimanfaatkan dengan benar, kebebasan pers akan memberikan manfaat positif bagi publik. Namun bila digunakan dengan serampangan, akan menyesatkan publik (Manan & Aswira, 2017).

Penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana dua hegemoni yang berbeda yakni hegemoni penguasa atau pemerintah pada era Orde Baru dan hegemoni media pada era Reformasi mempengaruhi jurnalis dalam melakukan reportase di lingkungan istana. Sejauh ini, informasi mengenai reportase jurnalis di lingkaran orang nomor satu di Indonesia masih sebatas publikasi

2 Lingkungan Istana Kepresidenan meliputi Istana Merdeka, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Wisma Negara (Biro Pers, 2015). Istana yang dimaksud disini adalah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta. Sejak pengakuan kedaulatan berpusat di Jakarta maka otomatis Istana Negara dan Istana Merdeka yang banyak digunakan baik untuk pemerintahan maupun untuk cara dan upacara kenegaraan resmi. Selain berfungsi sebagai kantor, Istana Negara dan Istana Merdeka kini digunakan pula sebagai tempat kediaman Presiden dan keluarga. Indonesia memiliki enam Istana Kepresidenan yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor di Bogor, Istana Cipanas di Cipanas, Istana Gedung Agung di Yogyakarta dan Istana Tampaksiring di Bali (Kleinsteuber & Rusdi, 2008).

buku atau karya populer³, dan media massa⁴. Publikasi ilmiah masih minim. Publikasi berjudul "Wartawan dan Elit Politik di dalam Kehidupan Politik di Indonesia: Komparasi antara Orde Baru dengan Era Reformasi di Indonesia" membandingkan hubungan media dan pemerintah di dua era tersebut. Artikel menelusuri regulasi pers dari waktu ke waktu dan ditulis berdasarkan studi pustaka (Putra, 2010).

Penelitian ini melihat bagaimana hegemoni penguasa atau pemerintah era Orde Baru (Soeharto) dan reformasi (Joko Widodo) mempengaruhi praktik reportase jurnalis. Era Reformasi diwakili dengan reportase jurnalis pada masa Presiden Joko Widodo. Hal ini karena dibanding dengan Presiden era kebebasan pers lainnya (Habibie, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono), Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo dianggap lebih fleksibel dengan protokol. Kedua kepala negara bersedia diwawancara oleh jurnalis dengan cara *doorstop*⁵. Sementara pada masa presiden sebelumnya, informasi biasanya hanya melalui konferensi pers atau forum wawancara yang sudah diatur secara khusus oleh Biro Pers Istana (Rastika, 2014).

Hegemoni Kelompok Dominan

Istilah "hegemoni" secara tradisional menandai suatu dominasi atau hal lain. Dalam konteks ini, kepemimpinan politik berdasarkan persetujuan pimpinan atau penguasa. Menurut Antonio Gramsci, politisi Italia yang dikenal dengan Teori Gramsci, hegemoni dan kediktatoran adalah fenomena yang saling tergantung. Ketiadaan konsesi atau kesediaan untuk saling memberi antara pimpinan dan masyarakat sipil ini dimaksudkan untuk memaksa (Bates, 1975).

Gramsci menyatakan bahwa supremasi atau kekuasaan tertinggi dari kelompok atau kelas sosial tercermin dengan dua cara yaitu: 'domina-

3 Buku berjudul "34 Wartawan Istana Bicara Tentang Pak Harto" diluncurkan pada Maret 2013 oleh Persaudaraan Wartawan Istana (PEWARIS); buku "Sisi Lain Istana" dan "Sisi Lain Istana Seri 2" ditulis oleh wartawan *Kompas* Joseph Osdar dan diluncurkan pada 2014, berisi kisah menarik dalam meliput kegiatan Presiden Soeharto hingga SBY; buku "Pak Beye dan Istananya", "Pak Beye dan Politikanya", "Pak Beye dan Kerabatnya", "Pak Beye dan Keluarganya", ditulis oleh wartawan *Kompas* Wisnu Nugroho dan mulai diterbitkan pada 2010, berisi kisah menarik saat meliput kegiatan Presiden SBY.

4 Harian *Kompas* menyajikan tiga edisi liputan bertajuk "Istana Istana" dimulai sejak edisi pertama pada 3-7 Juli 2017, edisi kedua pada 31 Juli hingga 7 Agustus 2017, dan edisi ketiga dimulai 14 Agustus 2017. Liputan tersebut mengulas segala hal tentang Istana Negara, Istana Merdeka, dan Istana Wakil Presiden.

5 Kata "doorstop" biasa digunakan jurnalis untuk menyebut wawancara informal dengan narasumber. Jurnalis mengajukan pertanyaan secara spontan dengan cara mencegat narasumber ketika keluar dari ruangan, gedung, kantor, atau di halaman.

tion' (*dominio*), atau koersi, dan 'kepemimpinan intelektual dan moral' (*direzione intellettuale e morale*), suatu supremasi yang mendasari hegemoni (Ferna, 1981). Gramsci menyadari bahwa kekuatan sosial bukanlah masalah dominasi di satu sisi dan perlawanan di sisi lain. Kelompok 'dominan' (atau, lebih tepatnya, aliansi, koalisi atau blok yang dominan) di dalam masyarakat demokratis akan mengatur kesepakatan, dan mempertahankan kesepakatan tersebut sesuai dengan dinamika hubungan antara penguasa dan yang dikuasai (Jones, 2006). Lebih jelas, Gramsci menyebut konsep hegemoni secara normal yaitu "kepemimpinan" dan "dominasi" secara bersama-sama (Ferna, 1981).

Suatu kelas atau kelompok melakukan hegemoni sejauh kelas yang mendominasi itu memiliki kepentingan atau kepentingan dalam derajat tertentu, terhadap kelas-kelas di bawahnya. Penggunaan istilah 'dalam derajat tertentu' berarti, dalam konteks ini, hegemoni bukanlah keadaan yang stabil, namun terus-menerus dihancurkan dalam 'proses yang hidup'. Artinya, proses ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan tapi juga pada makna bersama dan peruntukan makna kehidupan melalui kekuatan, bujukan dan keterlibatan (Marten-Barbero, 1993).

Kendati demikian, Gramsci menolak anggapan bahwa kekuatan adalah sesuatu yang bisa diraih sekali dan selamanya. Sebaliknya, kekuatan sebagai proses yang berkelanjutan. Budaya, politik dan ekonomi diorganisasikan dalam hubungan pertukaran timbal balik satu sama lain, sebuah jaringan pengaruh yang terus beredar dan bergeser yang kemudian diberi nama hegemoni (Jones, 2006). Sebuah hasil politis dari kemampuan kepemimpinan untuk secara intelektual dan moral menggerakkan masyarakat menuju serangkaian praktik budaya dan ekonomi yang tidak disukai ataupun disukai (Artz & Kamalipour, 2003).

Gramsci membagi peran intelektual dalam masyarakat menjadi dua bagian yakni "masyarakat sipil" dan "masyarakat politik." Masyarakat sipil merupakan hegemoni dari kelompok sosial seluruh masyarakat nasional melalui organisasi swasta seperti gereja, sekolah, serikat perdagangan, sekolah, dll. Masyarakat sipil memberi penghargaan pada pembentukan kesadaran sosial dan politik. Sementara masyarakat politik atau diktator atau aparatus koersif terdiri dari lembaga publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi, dan tentara yang menjalankan "kekuasaan langsung" (Bates, 1975; Ferna, 1981).

Gramsci juga menekankan bahwa dalam lapangan sosial terdapat pertarungan dalam memperebutkan penerimaan publik. Salah satu strategi kunci dalam hegemoni adalah nalar awam (*common sense*). Jika ide atau gagasan dari kelompok dominan diterima sebagai sebuah *common sense*, kemudian ideologi itu diterima maka hegemoni telah terjadi (Budianto *et al*, 2011).

Hegemoni Media

Menurut Straubhaar, hegemoni adalah penggunaan media untuk menciptakan konsensus seputar gagasan tertentu, sehingga diterima akal sehat (Straubhaar, LaRose, & Davenport, 2012). Sementara McQuail, mengambil pemahaman dari Gramsci, hegemoni digunakan untuk menggambarkan jenis kekuatan tertentu yang muncul dari merangkul seluruh kecenderungan ideologis media massa untuk mendukung sistem kekuasaan yang mapan dan mengecualikan nilai oposisi dan persaingan. Hegemoni merupakan konsensus dominan yang bekerja dengan cara tersembunyi tanpa paksaan langsung (McQuail, 2010).

Kepercayaan menjadi hegemonik ketika berupaya meyakinkan orang lain untuk bersekutu melalui praktik politik dan budaya yang persuasif. Upaya itu kemudian dinormalisasi dengan mengkomunikasikannya kepada massa melalui media (Artz & Kamalipour, 2003). Dengan terintegrasinya teknologi informasi dan hiburan ke dalam realitas sehari-hari masyarakat modern, pengaruh sosial media massa tidak mudah dikenali, didiskusikan, atau dikritik. Hegemoni media menjadi sulit dideteksi (Lull, 2011).

Jika Gramsci menyebut hegemoni lahir karena adanya kelompok dominan yang mengatur kesepakatan (Jones, 2006). Karl Marx menulis bahwa masyarakat didasarkan pada hubungan antara pemilik alat produksi dan pekerja. Pemilik perusahaan besar ingin menciptakan konsensus, atau hegemoni, ideologi yang mendasari dominasi pemilik yang terus berlanjut (Straubhaar *et al*, 2012).

Dengan demikian, dalam perusahaan media, pemilik media merupakan kelompok dominan. Seperti dinyatakan Gramsci, hegemoni juga mencakup peran kapitalis beserta anggota-anggotanya, baik merebut kekuasaan maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperolehnya. Kekuatan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi tetapi juga kekuasaan dan hegemoni (Budianto *et al*, 2011).

Meski kebutuhan konsumen, hukum penawaran dan permintaan masih mempengaruhi media, kesemuanya itu beroperasi dalam sistem ekonomi yang ditujukan untuk mempertahankan kepentingan kelas penguasa. Dalam hal ini, media tidak hanya mencerminkan kepentingan pemilik media, tetapi juga pengiklan, dan orang-orang berkuasa lainnya (Straubhaar *et al*, 2012). Oleh karena itu, hegemoni kapitalis membutuhkan hegemoni media sebagai cara melembagakan, makna sistematis dari mendidik, membujuk, dan mewakili kelas bawah atau subordinat (*subordinate*) untuk praktik budaya tertentu dalam konteks norma kapitalis. Demi mengamankannya kepentingan perusahaan, globalisasi kapitalis memerlukan hegemoni media untuk mengambil, menjinakkan, dan mempopulerkan interpretasi, informasi, dan perilaku budaya yang melengkapi

deregulasi, privatisasi, dan komersialisasi (Artz & Kamalipour, 2003).

Sistem privatisasi media dilakukan sesuai dengan penawaran budaya global dan domestik menjadi komoditas “*glocalized*” untuk dijual ke khalayak regional yang berbeda secara budaya. Privatisasi media dan budaya mengubah pengalaman sosial menjadi produk konsumen yang dapat dipasarkan. Dominasi hegemoni konsumeris - yang dipopulerkan oleh hegemoni privatisasi dan periklanan media - membongkar kelas pekerja dan kelompok bawah lainnya, karena mengelompokkan komunitas menjadi konsumen yang terpecah terutama konsumen yang menghargai hiburan dan pelarian diri. Secara politis, hegemoni konsumerisme memajukan sistem kapitalis (Artz & Kamalipour, 2003).

Hegemoni kelompok dominan yakni pemilik media, mempengaruhi kerja jurnalis. Hal ini karena tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi atau berita melalui media massa (Dewan Pers, 2010). Berita adalah produk media hasil kerja tim redaksi; lahirnya sebuah berita melewati proses reportase, penulisan, editing, dan pemuatan setelah disetujui rapat redaksi (Luwarsa, 2003).

Sebagaimana asumsi dari hegemoni media yaitu sosialisasi jurnalis meliputi petunjuk, rutinitas pekerjaan, dan orientasi yang penuh dengan ideologi yang dominan; dan jurnalis cenderung meliput topik-topik dan menyajikan laporan berita yang konservatif dan mendukung status quo (Severin & Tankard, 2009).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian kualitatif yakni memahami perilaku, persepsi atau pengalaman. Pemahaman ini dapat dilihat dari dua perspektif berbeda yakni dari bagaimana peneliti menggunakan bingkai referensi yang dimilikinya pada suatu persoalan, yang ditunjuk sebagai pemahaman, dan dari populasi studi dengan mengidentifikasi perspektif mereka pada persoalan penelitian. Dalam hal ini, mempelajari pengalaman hidup orang-orang yang terjadi dalam konteks historis yang spesifik dan konteks sosial (Henink *et al.*, 2011).

Studi kasus dilakukan pada Jurnalis Kepresidenan Republik Indonesia⁶ secara holistik. Artinya, melihat fenomena, persoalan, dan karakteristik dari kasus situasional dan sangat dipengaruhi segala peristiwa yang terjadi (Denzin & Lincoln, 2009). Jurnalis Kepresidenan Republik Indonesia dipilih karena berperan sebagai masyarakat sipil yang paling dekat dengan Presiden dan diang-

6 Menurut Pedoman Peliputan bagi Wartawan Kepresidenan, wartawan atau jurnalis kepresidenan merupakan wartawan atau pers nasional maupun asing yang ditugaskan oleh medianya masing-masing untuk meliput kegiatan kepresidenan (Biro Pers, 2015).

gap bisa menggambarkan atau membandingkan situasi reportase di setiap rezim pemerintahan. Selain itu, Jurnalis Kepresidenan bersifat tetap (memiliki jangka waktu peliputan di istana) dan terdaftar secara resmi di Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Selain harus tunduk pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, jurnalis yang bertugas di Istana Kepresidenan RI juga memiliki Pedoman Peliputan Kegiatan Kepresidenan bagi Wartawan Kepresidenan. Pedoman peliputan⁷ khusus itu meliputi tata tertib peliputan, sifat kegiatan kepresidenan yang terbuka dan tertutup untuk peliputan, mekanisme peliputan, hingga sanksi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen. Menurut data yang dihimpun Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, pada 2015 tercatat sebanyak 480 jurnalis kepresidenan. Jumlah itu berasal dari 24 stasiun televisi dalam negeri, 23 media *online* dan radio, 33 media cetak nasional, dan 41 media asing.

Wawancara dilakukan pada empat jurnalis kepresidenan yaitu: mantan jurnalis Harian Bisnis Indonesia, Retno Indarti sebagai jurnalis 1; mantan jurnalis Harian Merdeka, Agus Salim Suhana, sebagai jurnalis 2; jurnalis media siber Jawa Pos National Network (JPNN), Grup Jawa Pos, Natalia Laurens, sebagai jurnalis 3; dan jurnalis dari Grup Tempo, Ananda Wardhiati, sebagai jurnalis 4.

Jurnalis 1 dan 2 merupakan jurnalis yang mengalami reportase pada dua era pemerintahan yang berbeda, yakni era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dan era Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Kedua jurnalis tersebut merupakan jurnalis yang mengalami era Orde Baru namun masih aktif hingga saat ini. Jurnalis 1 tercatat sebagai jurnalis kepresidenan hingga tahun 2015, sementara Jurnalis 2 tercatat sebagai jurnalis kepresidenan hingga tahun 2016. Kedua jurnalis mampu membandingkan proses reportase pada dua era pemerintahan yang berbeda.

7 Menurut Pedoman Peliputan Bagi Wartawan Kepresidenan yang diterbitkan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, peliputan kegiatan kepresidenan adalah peliputan kegiatan presiden dan/ atau istri/suami presiden, tamu negara serta kegiatan penting lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan. Kegiatan Kepresidenan bisa bersifat tertutup/intern atau terbuka. Tertutup berarti kegiatan tidak dapat diliput jurnalis. Terbuka bisa berarti: dapat diliput di awal berupa kata pengantar/pembuka kegiatan seperti pada rapat terbatas, sidang kabinet paripurna, tamu negara, dan audiensi; atau dapat diliput seluruh kegiatan seperti keterangan pers, pelantikan upacara dan peresmian.

Jurnalis 3 dan 4 merupakan jurnalis dari media konvergensi. Jurnalis 3, selain bertugas menulis berita untuk media siber *jpnn.com*, juga kerap menulis berita untuk media cetak daerah yang berada di bawah grup Jawa Pos. Jurnalis 4, selain bertugas menulis berita untuk Majalah Tempo, juga wajib menulis berita untuk Koran Tempo dan media siber *tempo.co*. Kedua jurnalis mampu mengungkap proses reportase jurnalis dalam kondisi saat ini yaitu kepentingan perusahaan atau pemilik media. Kedua jurnalis mengalami reportase pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Dalam penelitian ini, reportase jurnalis kepresidenan pada era Orde Baru terjadi pada masa Presiden Soeharto, dan era kebebasan pers difokuskan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini juga didukung dokumen dan arsip. Dengan demikian, unit observasi penelitian ini adalah jurnalis, sementara unit analisis penelitian ini yakni tindakan/perilaku dalam melakukan reportase.

Hasil Penelitian

1. Akses Reportase

Pemberitaan media massa pada masa Orde Baru di lingkungan istana dibatasi oleh pemerintah. Ini terlihat dari akses jurnalis yang sehari-hari melakukan reportase kegiatan Presiden Soeharto. Menurut jurnalis 2, tidak semua jurnalis yang bertugas meliput di istana memperoleh kartu identitas. Pada saat itu, jumlah jurnalis masih sedikit karena belum ada media *online*. Jurnalis media cetak yang memperoleh akses di istana dibatasi jumlahnya. Jurnalis media televisi dan radio hanya dibatasi media milik pemerintah yaitu jurnalis dan juru kamera Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Jurnalis yang diajukan perusahaan pers untuk bertugas di Istana Kepresidenan disaring (*screening*) terlebih dahulu. Penyaringan dilakukan dalam jangka waktu tertentu (tidak setiap tahun). Dalam proses penyaringan tersebut, jurnalis harus menjawab pertanyaan tertulis dan wawancara. Lulus atau tidaknya jurnalis dalam proses *screening*, ditentukan oleh Badan Intelijen Negara. Jika lulus, jurnalis akan memperoleh kartu identitas, diperkenankan masuk dan meliput di dalam istana. Kendati demikian, tidak semua jurnalis yang bertugas di Istana Kepresidenan melalui proses *screening*.

Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, jurnalis yang tidak memiliki atau belum mendapat kartu identitas jurnalis kepresidenan, biasanya hanya menunggu di ruang jurnalis (*press room*)⁸ di Gedung Sekretariat Negara.

⁸Menurut Pedoman Peliputan bagi Wartawan Kepresidenan yang diterbitkan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Januari 2015, *press room*/balai wartawan ditujukan sebagai ruang tunggu dan ruang kerja wartawan sebelum dan sesudah melakukan peliputan di

Sementara, jurnalis yang sudah memiliki kartu identitas diperkenankan meliput kegiatan presiden di dalam istana.

Menurut jurnalis 1, pada era Soeharto, jurnalis yang diberi tugas melakukan reportase di istana merupakan jurnalis senior yang sudah berpengalaman dengan rata-rata berusia 30 tahun ke atas. Sebaliknya, pada era Joko Widodo, setiap perusahaan pers memiliki kesempatan menugaskan jurnalis di istana sejauh mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan dan telah terdaftar secara resmi di Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Proses penyaringan dilakukan oleh Rumah Tangga Kepresidenan⁹. Namun, pengalaman reportase jurnalis kepresidenan era Joko Widodo tidak seperti era Soeharto. Jurnalis 4, misalnya, bertugas di istana dengan pengalaman dua tahun menjadi jurnalis.

2 Aktivitas Reportase

Pada era Presiden Soeharto, jurnalis memiliki waktu reportase dengan jadwal yang lebih pasti. Waktu kerja presiden setiap hari biasanya dimulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 WIB. Jika Presiden Soeharto memiliki agenda pertemuan dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi, BJ Habibie seusai jam kerja, maka jurnalis tidak diperkenankan meliput. Jurnalis mematuhi ketentuan tersebut. Peliputan hanya boleh dilakukan jika narasumber tersebut akan menyampaikan informasi kepada jurnalis atau media. Kondisi ini berbeda pada era Joko Widodo, dimana jurnalis akan tetap menunggu narasumber yang hadir di istana tanpa kenal waktu.

Kalau dulu umpamanya Pak Harto itu kalau sudah ketemu Habibie itu *nggak* bisa diganggu gugat. Memang mereka kalau ketemu ya *udah* bisa berjam-jam. *Ngapain* juga kita *nungguin*. Nanti orang yang di dalam situ, '*nggak* usah ditungguin', kecuali kalau Habibie mau *ngasih* keterangan, 'tungguin ya, bapak mau ngomong'. Kalau *nggak*, *nggak*. Kalau sekarang kan ditungguin. Kalau dulu

lingkungan kepresidenan (Biro Pers, 2015).

⁹ Rumah Tangga Kepresidenan adalah sebuah lembaga di dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia atau dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolkan kepada Presiden. Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana, serta Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers dan Media dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media bertugas membantu Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam menyelenggarakan urusan keprotokolkan, pers, dokumentasi, media, dan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dan atau suami/istri Presiden (Kleinsteuber & Rusdi, 2008)

nggak, kalau dia bilang *udah ya udah*. (Jurnalis 1)

Jurnalis 4 mengatakan, agenda Presiden Joko Widodo di istana sangat padat. Bahkan seringkali di luar jam kerja. Sebagai jurnalis media yang harus menulis berita untuk media *online* dan media cetak (surat kabar dan majalah), kegiatan presiden tetap harus diikuti.

“Misalkan agenda, cuma ada satu *nih* yang di-*publish*. *Eh* ternyata agendanya penuh *gitu*, jadi suka tiba-tiba kayak *gitu*. Kita *nggak* percaya deh sama agenda *intern*, Presiden tuh pasti panggil menteri, panggil siapa *gitu*. Jadi memang selalu padat agenda di istana. (Jurnalis 4)”

Menurut jurnalis 1, pemberitaan seputar istana pada era Soeharto tidak sebebaskan saat ini. Jurnalis 1 lebih banyak mengalami kekhawatiran dan bersikap waspada dengan berita yang sudah ditulis.

“Kalau saya dulu kadang-kadang pagi-pagi itu yang saya *pikirin*, berita saya, nanti ditegur apa *nggak ya*, bener apa *nggak*. Itu tuh sudah otomatis. Kalau zaman dulu *tuh* begitu”.

Jurnalis 1 mengatakan, kondisi ini berbeda dengan jurnalis kepresidenan era kepemimpinan Joko Widodo yang justru lebih mengutamakan berita sensasi ketimbang kebenaran sebuah berita. Pernyataan dari anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir di istana juga ikut dilaporkan tanpa melihat bobot informasi yang disampaikan.

Jurnalis 1 mengkritik jenjang karier di media saat ini yang terlalu cepat sehingga redaktur lebih mengutamakan berita sensasi ketimbang kebenaran sebuah berita. Sementara pada era Orde Baru, kenaikan jenjang karier berjalan lebih lambat. Ketika bekerja di media cetak, posisi terakhir jurnalis 1 adalah asisten redaktur.

“Kalau zaman dulu *kan* mau jabatan asisten *aja* lama, ada prosesnya. Kalau sekarang *kan*, saya lihat anak-anak tahu-tahu sudah jadi redaktur pelaksana.”

Menurut jurnalis 1, jurnalis kepresidenan era Soeharto lebih kompak. Apabila ada informasi yang tidak diperkenankan untuk diangkat sebagai berita, maka jurnalis mematuhi perintah tersebut. Pada saat itu, jurnalis sangat memahami dampak pemberitaan. Berita yang sudah diterima publik biasanya akan dipercaya oleh khalayak sebagai kebenaran.

Sementara, menurut jurnalis 1, jurnalis kepresidenan di era kebebasan pers lebih sulit diatur ketimbang era Orde Baru. Jurnalis media *online*, misalnya, seringkali mengirim berita sekedar memenuhi tuntutan kuota berita tanpa melihat dampak pemberitaan tersebut. Menurut jurnalis 3, tidak ada yang bisa melarang jurna-

lis dalam membuat berita. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden akan ditegur oleh Presiden jika melarang wartawan menulis pemberitaan tertentu.

3, Kualitas Berita

Jurnalis 1 mengatakan, hampir setiap hari, pada hari kerja, Presiden Soeharto menerima tamu termasuk para menteri. Setelah presiden bertemu tamu, presiden atau menteri terkait akan memberi keterangan pers panjang lebar di hadapan jurnalis. Jumlah menteri akan lebih banyak ketika presiden mengadakan rapat terkait kebijakan tertentu. Dalam keterangan pers itulah, presiden atau menteri terkait menyampaikan informasi tentang pertemuan atau rapat yang baru saja dilakukan. Jurnalis kepresidenan bisa bertanya secara leluasa kepada narasumber. Waktu yang disediakan cukup panjang sehingga melakukan wawancara dengan narasumber secara *doorstop*, jarang terjadi.

Selain itu, sebelum Presiden dan para menteri memulai rapat kabinet atau sebelum Presiden memasuki ruang rapat, sebagian jurnalis diizinkan masuk ke dalam ruang rapat dan mewawancarai langsung para menteri yang dituju. Dengan akses reportase narasumber di istana tersebut, jurnalis media cetak bisa membuat hingga delapan berita per hari. Berita yang disampaikan merupakan jenis berita penting. Format berita jurnalis media cetak merupakan tulisan panjang.

Jurnalis 1 menambahkan, kondisi ini berbeda dengan akses reportase era Joko Widodo. Format berita menjadi lebih singkat, jenis berita menjadi kurang penting. Hal ini karena sebagian besar narasumber diwawancara sembari berjalan atau *doorstop*, dan seringkali disela oleh pertanyaan lain di luar konteks. Selain itu, jurnalis 3 menambahkan, menteri sebagai narasumber di Istana kerap tidak menguasai topik yang ditanyakan jurnalis meski isu tersebut terkait dengan kementeriannya.

Kehadiran jurnalis media *online* yang mengejar kuantitas dan kecepatan berita menjadi faktor pemicu semakin banyaknya berita singkat dari hasil wawancara *doorstop*.

“Kalau aku bilang malah, sekarang pendek-pendek, *nggak* jelas. Kalau dulu, mana ada berita pendek. Kalau saya tuh ya lebih suka, menteri ngomong panjang lebar *deh*, tapi bisa di-*bikin* berita daripada dia cuma sembari jalan, ‘pak apa pak?’ *doorstop* *gitu* tapi *nggak* jelas. Kadang-kadang kita *doorstop* nanti tiba-tiba ada yang *nyelonong* nanya di luar konteks. (Jurnalis 1)”

Jurnalis 2 yang saat ini bekerja di media *online*, membutuhkan informasi lebih cepat sesuai dengan permintaan perusahaan. Oleh karena itu, *doorstop* menjadi penting dengan tuntutan kecepatan. Pasalnya, siaran pers kegiatan Presiden yang terjadi pagi hari seringkali dikirimkan

oleh Tim Komunikasi Presiden pada sore hari. Informasi tersebut tidak bisa ditayangkan sehingga *doorstop* seusai acara menjadi satu-satunya pilihan untuk melengkapi berita utama.

Menurut jurnalis 3 dan 4 yang diwajibkan menulis berita untuk media *online* sekaligus media cetak, biasanya membuat 15 hingga 16 berita per hari. Bahkan, jurnalis 3 diwajibkan mengirim 15 berita untuk media *online* per hari. Jika tidak mencapai kuota tersebut, perusahaan mengurangi tunjangan produksi jurnalis yang bersangkutan.

“*Nggak mesti sih, tapi diusahakan 15 berita. Karena aku, kuota berita sebulan harus 250. Kalau kurang, dikurangi tunjangan produksinya.* (Jurnalis 3)”

Kehadiran jurnalis media *online* juga menambah jumlah jurnalis kepresidenan¹⁰. Ini menyebabkan tidak semua jurnalis kepresidenan bisa memperoleh akses wawancara dengan menteri di ruang rapat. Semakin banyaknya jumlah jurnalis kepresidenan serta perkembangan teknologi reportase menyebabkan terbentuknya jaringan komunikasi termidiasi teknologi melalui jaringan pesan instan (Grup WhatsApp), dan kelompok surat elektronik (*mailing list*). Teks pernyataan narasumber atau transkrip wawancara, siaran pers, foto, rekaman suara, dibagikan melalui jaringan tersebut. Kuantitas berita menjadi lebih banyak dan beragam. Kendati demikian, kualitas berita menurun. Kehadiran jaringan tersebut seringkali menyebabkan ketidakhadiran jurnalis di istana atau lokasi pemberitaan.

Selain bertambahnya informasi dan berita melalui jaringan komunikasi, situs web, dan media sosial, kuantitas berita pada era Joko Widodo bertambah karena semakin banyak narasumber di istana. Menurut jurnalis 2, selain berita di lingkungan Istana Kepresidenan, jurnalis kepresidenan juga bertanggungjawab untuk berita dari narasumber sekitar Istana Kepresidenan seperti Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Tim Komunikasi Presiden. Jurnalis 3 dari media *online* membuat berita di lingkungan istana tidak hanya dari narasumber yang memiliki jabatan/kedudukan di lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, tetapi dari orang-orang di sekitar istana seperti pengelola istana negara, *office boy*, protokoler presiden, pekerja taman, tukang masak, tukang sapu. Bahkan, jurnalis kepresidenan pun bisa menjadi narasumber berita. Kondisi ini tidak terjadi di era Presiden Soeharto.

Jurnalis 4 mengatakan, informasi/isu kontroversial di lingkungan Istana Kepresidenan menjadi bahan menarik untuk diberitakan. Misalnya,

10 Menurut data yang dihimpun Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, pada 2015 atau masa awal Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, jurnalis kepresidenan tercatat sebanyak 480 orang. Jumlah itu berasal dari 24 stasiun televisi dalam negeri, 23 media *online* dan radio, 33 media cetak nasional, dan 41 media asing (Biro Pers, 2015).

ketika Presiden Jokowi marah, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kebijakan yang dikeluarkan presiden, pergantian anggota kabinet/*reshuffle*, dll. Sedangkan ‘berita wangi’ seperti pemberian penghargaan kepada presiden, presiden bertemu masyarakat adat, tidak dijadikan berita.

Diskusi

Gramsci menggunakan istilah hegemoni untuk menunjukkan dominasi satu kelas sosial atas orang lain (seperti hegemoni borjuis). Dominasi ini bukan hanya sekedar kontrol politik dan ekonomi, tetapi juga kemampuan kelas dominan memproyeksikan jalan atau caranya sehingga orang-orang yang berada di bawah kekuatannya, menerimanya sebagai “*common sense*” dan sesuatu yang “alamiah” (Savigny, 2017)

Apa yang terjadi pada Indonesia di era Orde Baru menunjukkan hegemoni masyarakat politik atau kontrol politik. Dalam hal ini, pemerintah atau Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menanamkan kekuatannya secara paksa. Kekuatan itu kemudian dianggap sebagai suatu *common sense* dan alami dalam kehidupan bernegara.

Dominasi pemerintah terhadap perusahaan pers dan jurnalis di Indonesia terlihat pada gelombang bredel yang terjadi mulai kurun waktu 1970-an dengan puncaknya pada peristiwa Malari. Tidak hanya pencabutan surat izin terbit dan surat izin cetak, jurnalis yang dipandang menghina pemerintah dimasukkan dalam daftar hitam oleh aparat berwenang (Hill, 2011a).

Pembredelan terhadap media nasional dan daerah serta penahanan jurnalis banyak dilakukan oleh penguasa militer setempat. Pembredelan baik sementara maupun permanen menimbulkan berbagai macam akibat yaitu terhadap para penyelenggaranya (jurnalis) maupun pembaca dan orang-orang yang penghidupannya bersumber dari adanya surat kabar (Surjomihardjo *et al*, 2002).

Pada 1994, majalah *Tempo*, *Editor*, dan DeTik diberangus oleh pemerintah karena laporan politik yang berani. Ini menyebabkan ratusan wartawan dan pekerja media menjadi penganggur (Hill, 2011b). Hingga kemudian, tidak ada lagi masa di mana masyarakat pers bersikap frontal menentang tantangan dan tekanan dari pemerintah (Hill, 2011a)

Kondisi psikologis jurnalis pada masa Orde Baru yaitu timbul rasa ketidakpastian dalam profesi. Dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai wartawan, selalu mengalami kesulitan dalam menentukan berita mana yang boleh, mana yang tidak. Sumber-sumber berita (narasumber) pun ikut merasa tidak pasti, karena takut memberikan informasi. Situasi “serba mengambangnya” berita-berita akibat ketidakpastian para wartawan menyebabkan hambarnya isi surat kabar (Surjomihardjo *et al*, 2002).

Ini menjawab kondisi reportase jurnalis pada

masa Orde Baru yang berada dalam kondisi was-was saat akan menulis berita, terbatasnya akses peliputan, dan kepatuhan selama proses reportase. Selain itu, ketidakpastian dan keceemasan juga menyebabkan narasumber tidak bisa menyampaikan informasi sembarangan atau ala kadarnya. Informasi yang disampaikan kepada pers merupakan informasi yang sudah matang dan sesuai dengan kehendak penguasa. Tidak semua narasumber bisa menyampaikan informasi di media massa. Kondisi ini dianggap hal yang sewajarnya. Menurut pemahaman Gramsci, kekuasaan (*power*) merupakan sesuatu yang aktif dan dijalankan oleh orang-orang yang tertindas sebagai sebuah *common sense* (Jones, 2006).

Dapat dikatakan, jurnalis pada masa Orde Baru berada pada kepemimpinan dengan sistem otokrasi atau kepemimpinan dari atas ke bawah. Pemerintah menanamkan hegemoni dengan melakukan intervensi kepada pers. Perusahaan pers dan jurnalis menjadi subordinat. Menurut jurnalis senior, Jakob Oetama, kepemimpinan dengan sistem otokrasi berarti proses dan keterlibatan tidak penting yang penting kuat dan efektif, diukur dari hasilnya. Hasilnya adalah aman dan tertib, perekonomian laju (Oetama, 2009).

Ketika beralih ke era reformasi yang bercorak liberal, pers lebih bebas dalam menyampaikan informasi. Peran jurnalis menjadi penentu (Putra, 2010). Kendati demikian, pers menjadi sebuah industri, suatu kegiatan ekonomi yang mencari laba sebesar-besarnya. Sebagai pencari laba, kemerdekaan pers dipertukarkan sepanjang berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi dari perusahaan pers (Manan, 2012).

Jurnalis menjadi kelas pekerja atau subordinat yang berada dalam hegemoni kapitalis. Pemerintah tetap mengatur kerja jurnalis lewat UU Pers, namun dominasi kepada jurnalis dalam praktik reportase seutuhnya dilakukan oleh pengusaha media atau kolaborasi pemerintah dan pengusaha. Pada era reformasi didapati sejumlah perusahaan pers terutama di daerah berkolaborasi dengan kekuasaan untuk memanfaatkan sumber daya dari kekuasaan dengan imbalan tertentu demi sebesar-besarnya laba perusahaan (Manan B., 2012). Seperti pendapat Gramsci, masyarakat sipil bisa menjadi superstruktural. Masyarakat sipil termasuk organisasi politik, keagamaan, sistem sekolah, tim olahraga, komunikasi dan media, industri hiburan, dan keluarga. Semuanya itu, saat ini merupakan sektor utama dalam ekonomi (Jones, 2006).

Pers sebagai sebuah perusahaan industri, harus tunduk pada kaidah kaidah manajemen yang bersifat baku seperti kebutuhan pasar (Luwarsu, 2003). Struktur perusahaan media berkembang sebagai sebuah perusahaan industri (*industrial enterprises*). Perusahaan media menstandarisasi produk dan proses, mencari efisiensi produksi yang lebih besar. Perusahaan di industri media mulai menyamai sektor lain seperti dalam hal menarik sumber daya manusia, keuangan,

teknologi, dan sumber daya lain yang tersedia (Tassel & Poe-Howfield, 2010). Dalam penelitian ini, perusahaan media sebagai sebuah industri menyebabkan regenerasi jurnalis lebih dini, untuk meminimalisir biaya operasional perusahaan dari sisi upah, konsentrasi kepemilikan media, dan konvergensi media.

Konvergensi berarti bahwa tugas karyawan/jurnalis tersebar di beberapa atau semua jenis media yang dimiliki perusahaan. Hal ini karena perusahaan media menggabungkan operasi media cetak, siaran, dan *online* ke dalam satu ruang berita (*newsroom*). Penghematan dari konvergensi ini menjadi salah satu kekuatan finansial perusahaan media (Herrick, 2012). Kondisi ini menyebabkan kinerja jurnalis didasarkan pada kuantitas laporan reportase dan kecepatan pelaporan. Dengan tekanan itulah maka jurnalis berupaya mencari berita dari narasumber sebanyak-banyaknya, termasuk narasumber tidak resmi.

Meski sudah ada saluran resmi melalui konferensi pers, jurnalis tetap melakukan wawancara secara *doorstop* untuk menanyakan isu lain. Akibatnya, jurnalis menulis berita dengan format pendek dan dangkal, lebih mengutamakan berita sensasi atau kontroversial, hingga aktivitas reportase tanpa henti dengan tenggat waktu (*deadline*) setiap detik. Marcuse menafsirkan media, bersama dengan elemen sistem produksi massal lainnya, seperti terlibat dalam 'menjual' atau memaksakan seluruh sistem sosial yang sama-sama diminati dan represif atau menindas (McQuail, 2010).

Dominasi pemilik media ini didukung dengan kebebasan pers yang dijamin dalam UUD 1954 dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Awalnya, fungsi pers sebagai media informasi atau penyampai berita. Dalam politik, pers berperan menyalurkan, membentuk dan mempengaruhi pendapat umum. Namun, seiring perkembangan pers sebagai sebuah usaha, pers berkembang sebagai usaha ekonomi atau bisnis (Manan, 2012). Dalam perjalanannya, kemerdekaan pers mengalami distorsi terutama bersumber dari insan pers atau praktisi pers akibat tidak dilaksanakannya tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan norma etik dan hukum (Harahap, 2013). Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kepatuhan jurnalis terutama terhadap upaya mengekang kebebasan melaporkan berita. Jurnalis juga bebas melakukan wawancara dengan narasumber yang mendukung pemberitaan.

Pada akhirnya, *superstructure* bekerja untuk mempertahankan struktur ekonomi yang ada dan menyamakan atau melegitimasi kondisi riil dari eksploitasi ekonomi. Perubahan secara *superstructural* seperti reformasi, penghapusan aturan, tidak akan banyak mengubah karakteristik penting dari eksploitasi kapitalis (Jones, 2006). Dalam hal ini, Gramsci menyebut kelompok penguasa ingin "mendominasi", bukan untuk "memimpin", dan selanjutnya membuat dominasi kepentingan (Bates, 1975).

Tabel 1. Perbedaan Masa Soeharto dan Joko Widodo

	Era Orde Baru (Presiden Soeharto)	Era Reformasi (Presiden Joko Widodo)
Superstruktur	Presiden, pemerintah, pengadilan, dan aparatus koersif (polisi dan tentara)	Pemilik media, pemerintah, kombinasi pemilik media, pemerintah, pengiklan, dan khalayak (kebutuhan pasar)
Subordinat	Perusahaan pers dan jurnalis	Jurnalis dan kelas pekerja dalam ruang berita (newsroom)
Supremasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi atau koersi penguasa negara, 2. Kepemimpinan intelektual terletak pada masyarakat politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi pemilik media, 2. Kepemimpinan intelektual terletak pada masyarakat sipil
Kepentingan	Politik, ideologi penguasa, ekonomi rakyat	Politik, ideologi pemilik media, ekonomi perusahaan pers
Common sense	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecemasan dan ketidakpastian terhadap berita yang ditulis, 2. Terbatasnya akses peliputan 3. Terbatasnya narasumber, 4. Kepatuhan selama proses reportase. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja didasarkan pada kuantitas laporan reportase dan kecepatan pelaporan. 2. Ruang lingkup peliputan yang semakin besar 3. Narasumber semakin beragam, 4. Ketidaktaatan terhadap aturan sebagai implikasi tekanan perusahaan media dan kebebasan pers
Produk Berita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita lebih komprehensif, 2. Berita bersifat penting, 3. Narasumber resmi yang kredibel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita format pendek dan dangkal 2. Berita sensasi dan kontroversial karena memiliki konsumen yang mengutamakan hiburan dan pelarian diri (escapism) 3. Narasumber yang seringkali tidak resmi/kredibel

Kesimpulan

Pers tidak pernah lepas dari hegemoni dominan yang menguasai suatu negara. Hal ini karena, hegemoni bersifat dinamis. Pada masa Orde Baru, perusahaan pers, jurnalis, dan narasumber merupakan subordinat atau berada di bawah kekuatan dominan. Pemerintah memegang hegemoni melalui tindakan represif kepada perusahaan dan pekerja media. Tindakan ini berupa ancaman pembredelan dan penahanan/bui. Hegemoni pemerintah otoriter mempengaruhi kondisi psikologis penyelenggara pers dalam hal ini perusahaan pers dan jurnalis dalam melakukan reportase. Kecemasan dalam menulis berita berimplikasi pada produk berita yang dihasilkan baik dari sisi format, jenis, hingga narasumber berita. Ketidakpastian dan kecemasan dalam reportase sebagai dampak dari tindakan koersif

dan represif tersebut dianggap suatu hal yang lumrah atau *common sense*.

Perubahan rezim dari otoriter ke era reformasi atau kebebasan pers nyatanya tetap menempatkan pekerja media atau jurnalis sebagai subordinat. Bedanya, jurnalis berada dalam tekanan pemilik media/kapitalis, atau kolaborasi pemilik media dan pemerintah. Proses reportase jurnalis berjalan seperti halnya sebuah industri. Dalam hegemoni media, reportase jurnalis sebagai kelas pekerja, dipengaruhi oleh tidak hanya dominasi pemilik media, tetapi juga pemerintah dan kebutuhan pasar atau khalayak. Kebebasan pers terdistorsi oleh kepentingan ekonomi perusahaan. Ini berimplikasi pada produk berita yang dihasilkan baik dari segi format berita lebih singkat/pendek, penuh sensasi, dan pencantuman narasumber yang semakin beragam.

Daftar Pustaka

- Adisubrata, W. (2013). Dari Persbreidel Ordonantie Tahun 1931 Hingga Kemerdekaan Pers Dalam Era Reformasi. *Jurnal Dewan Pers*, 8, 11-18.
- Archetti, C. (2013). Journalism in the Age of Global Media: The Evolving Practices of Foreign Correspondents in London. *Journalism*, 14(3), 419-439.
- Artz, L., & Kamalipour, Y. R. (2003). *The Globalization of Corporate Media Hegemony*. New York: State University of New York Press.
- Bates, T. R. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. *Journal of the History of Ideas*, 36(2), 351-366.
- Biro Pers. (2015). *Pedoman Peliputan Kegiatan Kepresidenan bagi Wartawan Kepresidenan 2015*. Jakarta: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
- Bivens, R. K. (2008). The Internet, Mobile Phones, and Blogging. *Journalism Practice*, 2(1), 113-129.
- Budianto, H., Nugroho, H., & Wahyuni, H. I. (2011). Media Massa dan Pertarungan Politik Kasus Bank Century. *Media dan Komunikasi Politik* (p. 14). Jakarta: Program Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Chen, L. C. (2013). Convergence of New and Old Media: New Media Representation in Traditional News. *Chinese Journal of Communication*, 6(2), 183-201.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. CA: Sage Publications.
- Dewan Pers, P. 2.-2. (2010, September). Mengembangkan Kemerdekaan Pers, Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional. *Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan*. Dewan Pers.
- Fernia, J. V. (1981). *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. Oxford: Oxford University Press.
- Harahap, N. (2013, Desember). Melindungi Kemerdekaan Pers. *Jurnal Dewan Pers*, 8, 41-53.
- Hennink, M., Hutter, I., & A. B. (2011). *Qualitative Research Methods*. California: Sage Publications.
- Herrick, D. F. (2012). *Media Management in the Age of Giant: Business Dynamics of Journalism*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Hill, D. T. (2011a). *Jurnalisme dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, D. T. (2011b). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, S. (2003). Membangun Jembatan Saling Pengertian antara Media dan Lembaga Penegak Hukum. Dalam Luwarso, L (ed), *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Jones, S. (2006). *Antonio Gramsci*. New York: Routledge.
- Kleinsteuber, A., & Rusdi, A. (2008). *Duta Bangsa, Istana Merdeka Istana Negara, Istana Kepresidenan Republik Indonesia Simbol Kebersatuan Dalam Keberagaman*. Jakarta: AS Productions Indonesia.
- Kompas. (2017, August 13). Perang Vs Media ala Netanyahu-Trump. p. 3.
- Lull, J. (2011). Hegemony. In G. Dines, & J. M. Humez, *Gender, Race, and Class in Media: A Critical Reader Edition 3*. California: Sage Publications.
- Luwarso, L. (2003). *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Manan, A., & Aswira, J. (2017). *Hantu Senjakala dan Intimidasi, Laporan Tahunan AJI 2017*. Jakarta: Yayasan TIFA.
- Manan, B. (2012). *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Marten-Barbero, J. (1993). *Communication, Culture, and Hegemony: From the Media to Mediations*. Barcelona: Sage Publication.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory. 6th Edition*. Los Angeles: Sage Publications.
- Oetama, J. (2009). *Bersyukur dan Menggugat Diri*. Jakarta: Penebit Buku Kompas.
- Oktavianti, R., & Irwansyah. (2016). Actor Network in Technology-Mediated Communications Network: A Study of News Gathering Network by Journalist. *The Social Sciences*, 11(19), 4581-4584.
- Putra, A. M. (2010, September). Wartawan dan Elit Politik di dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *MediaKom*, 3(10).
- Rastika, I. (2014, Oktober 20). *Home: Nasional News*. Diakses dari Kompas.com: <http://nasional.kompas.com>
- Savigny, H. (2017). *Political Communication, A Critical Introduction*. London: Palgrave.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2009). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa edisi Kelima*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sinaga, E. K. (2014, Oktober 18). *alasan-sby-sering-gunakan-media-sosial-untuk-berinteraksi-dengan-rakyat*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com>.
- Straubhaar, J., LaRose, R., & Davenport, L. (2012). *Media Now: Understanding Media, Culture and Technology Seventh Edition*. MA.: Wadsworth Cengage Learning.
- Sukendro, G. G. (2000). *Pers Dalam Pemerintahan: Sikap Pers Indonesia Dalam Pemerintahan Orde Baru (Tabloid DeTIK) dengan Pemerintahan Orde Reformasi (Tabloid DeTAK) dalam Tinjauan Studi Analisis Isi Berita Utama*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Surjomihardjo, A., Adil, H., Lopian, A., & Hardjoprakoso, M. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tassel, J. V., & Poe-Howfield, L. (2010). *Managing Electronic Media: Making, Marketing & Moving Digital Content*. Massachuset: Focal Press Elsevier Inc.